



Menunggu Keputusan Menteri

SUKADANA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunggu surat keputusan kementerian tentang peningkatan status jalan termasuk status jalan Perawas. Diharapkannya mampu meningkatkan perekonomian rakyat khususnya di Kalimantan Barat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mendapatkan Rp12 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Jalan Siduk - Teluk Batang. Anggaran tersebut dibagi dua, pertama untuk peningkatan Jalan

Siduk - Sukadana sepanjang 2,07 KM sebesar Rp7 miliar dan pemeliharaan Jalan Sukadana - Teluk Batang sebesar Rp5 miliar lebih.

"Mengenai perubahan status jalan itu lima tahun sekali waktu itu, SK Menteri terakhir keluar tahun 2016, jadi nanti tahun 2021 akan keluar lagi SK peningkatan status jalan dari Menteri. Kami sebagai pemerintah provinsi membantu mengusulkan melalui Gubernur. Hal ini sudah kita bahas termasuk saya sudah pegang respon dari kementerian, memang berpotensi untuk menjadi jalan nasional," papar Kepala Bappeda Provinsi Kalbar Yuslinda saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2021 di Sukadana, Kamis, (12/03).

Sementara itu, Bupati Kayong Utara Citra Duani

berharap agar peningkatan status jalan di Kayong Utara segera terealisasi agar pelabuhan nasional yang terletak di Teluk Batang segera beroperasi. Peningkatan akses jalan yang menjadi jalur yang dinilai paling ekonomis jika ingin ke kota provinsi tersebut yang

telah menjadi dambaan masyarakat Kayong Utara.

"Apabila pelabuhan Teluk Batang ini sudah berfungsi maka Kabupaten Sekadau, Sanggau, Kapuas Hulu dan Sintang akses mereka

lebih dekat untuk mengeluarkan barang - barang produksinya. Ketimbang mereka harus ke Pontianak maupun Pelindo di Mempawah maka ini alasan kenapa Jalan Perawas harus segera dibangun," kata Citra Duani.

Bupati menceritakan, jika perjuangan pemerintah, baik Kabupaten dan Provinsi tidak mudah untuk merubah status jalan Perawas. Sebab harus berjuang hingga ada argumen yang kuat ke pemerintah pusat agar usulan tersebut diterima.

"Sudah mengusulkan pemerintah provinsi tahun 2018- 2019 untuk peningkatan status. Karena dasarnya sudah jelas yaitu membangun bandara ada pelabuhan nasional. Kita berharap bulan Mei ini sudah keluar, tapi memang berat perjuangan kita karena harus beradu argumen yang kuat apa pertimbangan strategisnya," pungkasnya. **(dan)**



Citra Duani